**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam adalah ajaran yang *syaamil*, konsepsi yang komprenhensip, menyentuh seluruh sektor kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Islam tak hanya mengatur pemeluknya dalam ruang lingkup privat, mulai akan dan bangun tidur, masuk dan keluar WC, masuk dan keluar mesjid, Islam juga mengatur persoalan publik sampai tingkat kepemerintahan mulai dari politik,ekonomi,sosial dan budaya.

Memang masih *debatable*, apakah Islam mengatur soal politik atau tidak. Namun, dari perilaku dakwah Rasulullah yang bersinggungan dengan para penguasa,tersirat sangat kuat bahwa Rasulullah selain bertakwa juga menerapkan politik moral. Ada pergulatan politik di tengah-tengah kesibukan dakwahnya. Terbukti Rasulullah harus diisolasi, dikejar dan berusaha dibunuh karena potensi politisisnya yang besar.[[1]](#footnote-2)

Al-Quran telah menentukan tujuan hidup dan berbagai keinginan manusia dalam berbagai kehidupan. Islam sebagai ideologi yang kompleks telah menampilkan diri penuh kesuksesan dalam kancah pergulatan perhelatan dunia. Konsep sebagai rahmatan lil’alamin telah betul-betul dirasakan oleh segenap pendududk dunia, baik yang menjadi pemeluknya maupun tidak. Kesuksesan konsep Islam yang sempurna dalam membangun tatanan dunia dengan peradaban maju dan luhur tidak terlepas dari upaya yang gigih dari seorang Rasul yang di kenal dengan gelar Al-Amin.

Masalah hukum dan konsep kehidupan Islam telah muncul secara konkret sejak masa Nabi Muhammad saw. bergerak di Madinah ketika ia mendirikan, membangun dan mengatur masyarakat kota tersebut, dan kemudian berhubungan dengan masyarakat dan negara lain.[[2]](#footnote-3) bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta, dan manusia serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya.

Agar manusia mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini untuk kemudian diganti dengan pemikiran lain. Sebab pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat *mafahim* (persepsi) terhadap segala sesuatu.[[3]](#footnote-4) Sebagai satu agama yang mengklaim ajaranya akan membawa kebahagian manusia di dunia dan akhirat, Islam wajar menjadi relevan bahkan dalam kurun pasca industri ini. Yang menjadi persoalan disini bukan Islam sebagai yang tercantum dalam al-Qur’an dan Sunnah serta pendukung kedua sumber tersebut. Hal itu sudah jelas kedudukannya. Tetapi yang diangkat adalah pada satu pihak persepsi orang Islam terhadap agamanya.

Dewasa ini, Islam tengah melewati salah satu kurun waktunya yang paling penting. Pada paruh abad keduapuluh ini, diseluruh dunia telah terjadi kebangkitan-kebangkitan Islam. Selama dua dekade terakhir belenggu penjajahan politik di banyak tempat telah dipatahkan. Diseluruh pelosok dunia Islam, gerakan-gerakan intelektual dan kultural yang ditujukan untuk mewujudkan renaisans Islam telah muncul. Memang ada pasang dan surut, sesuai dengan perkembangan dan situasi dan kondisi politik, tetapi gerakan kebangkitan Islam ini keseluruhannya secara bertahap cenderung semakin menanjak.[[4]](#footnote-5)

Pencapaian Barat dalam berbagai bidang telah menimbulkan berbagai akibat terhadap dunia Islam dan orang Islam. Apapun kontribusi Islam dalam pencapaian tersebut, Barat tetap melihat dunia Islam “dipimpin” dan “dikuasai” paling tidak dalam kehidupan ekonomi dan teknologi. Kelebihan Barat dalam dunia materi, telah tidak mungkin ditutup-tutupi lagi oleh dunia Islam. Tawaran yang diberikan kendati menggiurkan, selalu bercorak partenalis, apakah itu sistem demokrasi, pasar terbuka, ekonomi global, sekularisme, ataupun lainnya. Bagi orang Islam pandangan yang mendiskreditkan daya dan upaya mereka tidak selalu dibiarkan begitu saja. Berbagai upaya telah dibangkitkan mulai dari penentangan penjajahan sampai dengan partisipasi astronaut Saudi Arabia dalam misi penerbangan angkasa luar Amerika. Tetapi memang berbagai pengalaman dan sifat terhadap Barat seperti benci, khawatir, kagum, dan kemandirian telah bercampur sehingga sikap dan respon orang Islam tidak monolit, bahkan berbeda secara generasi, space dan waktu. [[5]](#footnote-6)

Sejarah telah mencatat, berdirinya Republik ini tak luput dari peran partai-partai Islam. Maklum, Indonesia adalah negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam perkembangan selanjutnya, partai-partai Islam terus mendominasi kehidupan politik di negeri ini. Namun setelah 15 tahun era reformasi, dominasi partai politik Islam mulai memudar. Hal itu ditandai dengan semakin sedikitnya tokoh-tokoh Islam yang tampil menjadi memimpin bangsa. Sementara peran tokoh-tokoh nasionalis semakin kuat.

Partai politik adalah suatu kelompok yang kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan motivasi dengan ideologi tertentu yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu tentu membutuhkan dukungan yang besar dari rakyat. Rakyat akan memilih partai yang dapat memperjuangkan aspirasinya. Dari situ dapat dilihat betapa pentingnya peranan partai politik, khususnya dalam menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan.[[6]](#footnote-7) Pada tahun-tahun belakangan ini muncul beberapa istilah yang dipopulerkan oleh perkataan dan tulisan sebagian kaum sekuler dan kaum orientalis dari kelompok kiri dan kelompok kanan, yakni pengikut ideologi Marxis Timur dan ideology liberal Barat. Salah satu diantaranya adalah istilah “Islam Politik” (*al-islam as-siasyi)*. Maksudnya adalah Islam yang memperhatikan urusan Umat Islam serta hubungannya baik kedalam ataupun keluar, dan usaha membebaskanya dari kekuasaan asing yang mencekik leher mereka, mengarahkan urusan materiil dan peradaban sebagaimana yang dikehendaki Islam, kemudian berusaha membebaskanya dari cengkraman penjajahan Barat baik masalah dalam kebudayaan, sosial kemasyarakatan, politik, dan perundang-undangan, untuk kembali berhukum kepada syariat Allah dalam kehidupan meraka. Mereka melontarkan istilah “Islam Politik” ini dengan maksud menjauhkan orang dari kandungan syariat Islam dan dari para juru dakwahnya yang menyeru manusia kepada Islam yang komprehensif sebagai aqidah dan syariat, din dan daulah.[[7]](#footnote-8)

Reformasi pasca otoritarisme Orde Baru, telah menghidupkan kembali demokrasi. Pertumbuhan partai politik pada masa ini tidak terhindarkan lagi sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang harus ada didalam suatu negara modern. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memperjuangkan keinginan sosial mereka. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai.

Di Indonesia, munculnya partai-partai politik tidak lepas dari adanya iklim kebebasan yang luas pada masyarakat pasca pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan demikian memberikan ruang kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Selain itu, lahirnya partai politik di Indonesia juga tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan, yang tidak saja dimaksudkan untuk memperoleh kebebasan yang lebih luas dari pemerintahan kolonial Belanda, juga menuntut adanya kemerdekaan. Hal ini bisa kita lihat dengan lahirnya partai-partai sebelum kemerdekaan.[[8]](#footnote-9)

Disamping didorong oleh iklim demokrasi, munculnya partai-partai politik di indonesia juga tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagaimana dikatakan oleh John Furnival[[9]](#footnote-10) Masyarakat Indonesia atau Hindia belanda ketika itu merupakan masyarakat plural *(plural society),* yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Hanya saja, sambung Furnival, di antara mereka itu tidak pernah bertemu di dalam suatu unit poltik. Namun realitas di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat yang majemuk itu pada akhirnya bergabung dalam suatu unit politik besar yang dinamakan partai politik.

Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk memberikan kontribusi yang besar bagi lahirnya partai-partai politik dan sistem multipartai di Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, partai-partai politik yang ada tidak terlepas dari ikatan-ikatan kelompok yang kuat, khususnya yang berkaitan dengan ikatan ideologi. Herbert Feith menggambarkan corak ideologi partai-partai pada 1950-an, kedalam lima aliran besar:[[10]](#footnote-11) Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme. Corak politik aliran seperti ini tidak hanya berbeda, tetapi juga bernuansa konfliktual karena di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan nilai yang cukup mendasar. Meminjam istilah Giovani Sartori, corak sistem kepartaian ketika itu lebih cenderung ke arah pluralisme ekstrem[[11]](#footnote-12) karena jumlah partai dominannya lebih dari dua dan relasi partai ideologi partai yang satu dengan yang lain lebih cenderung ke arah sentrifugal.[[12]](#footnote-13)

Partai politik Islam yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah partai politik yang secara tegas mencantumkan asasnya adalah Islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Berdirinya Partai Keadilan (PK) bisa dikatakan berbeda dengan partai lainnya baik partai yang berbasis ideologis maupun yang non ideologis. Kelahiran partai keadilan berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang membahas tentang penyikapan terhadap era reformasi yang membuka keran kebebasan untuk berekspresi diantaranya mendirikan partai politik. Persoalan mendirikan partai adalah agenda yang hangat dibicarakan kalangan tarbiyah, sebagian mengatakan perlu mendirikan partai politik dan sebagain menyatakan tidak perlu.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mambaca situasi politik kepartaian yang terjadi di Indonesia. Kemunculan atau lahirnya Partai Keadilan Sejahtera memberikan makna tersendiri bagi dari perjalanan sistem kepartaian di Indonesia hingga hari ini, salah satu partai politik Islam yang memperoleh suara paling besar diantara partai politik Islam lainnya, yakni berdirinya kembali partai Islam di Indonesia yang menandakan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam masih memberikan kepercayaan yang besar pada partai Islam. Selanjutnya akan dibahas lebih jauh awal terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera yang dulunya bernama Partai Keadilan.

Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera tidak bisa lepas dari peranan Partai Keadilan. Pernyataan ini bukan tanpa bukti. Bisa kita amati dimana pada pemilu 1999, Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan electoral threshold, sehingga tidak bisa mengikut pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang.[[13]](#footnote-14) Karena kegagalan ini Partai Keadilan (PK) bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Beberapa pengamat menilai bahwa salah satu faktor kekalahan partai Islam pada pemilu 1999 adalah parpol Islam belum menampakan inklusivitasnya. Indikasi ini diperkuat oleh kritikan Van Zorge, yang menilai Partai Keadilan sebagai modernis-ekslusif (modernist-exclusivist). Kecendrungan terlalu besar kearah eksklusif akan menyulitkan partai ini untuk maju, dan bahayanya bagi PK akan potensial untuk ‘layak dimusuhi’ oleh kawan-kawan penganut Islam Kultural. Dan celakanya, justru eksklusifisme adalah lawan paling potensial bagi cita-cita membangun watak bangsa. Watak bangsa tidak mungkin dibangun paralel dengan eksklusifisme. Dibalik kritikan itu Van Zorge juga memberikan penilaian “inklusif”. PK yang diakuinya sebagai partai reformist dan unique itu, disebut-sebut sebagai partai yang gampang berkompromi dan bekerja sama ketika berhadapan dengan realitas politik. ”Partai Keadilan has demonstrated a willingness in the past to compromise and work within the confines of political realities,” ujar Van Zorge.[[14]](#footnote-15) Untuk itu, PK kedepannya memiliki prospek untuk menjadi partai inklusif dan ini terlihat sejak transformasi Partai keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Perlunya sikap inklusif ini juga dibenarkan oleh R William Liddle, menurutnya Partai-partai inklusif dianggap lebih otonom atau mandiri, sebab pengurusnya tidak dikuasai oleh satu kekuatan sosial, seperti organisasi agama atau kelompok etnis tertentu. Partai-partai semacam itu juga lebih luwes dan fleksibel, sebab pengurusnya tidak dihalangi oleh komitmen-komitmen sempit dalam merangkul berbagai kekuatan sosial baru. Lagi pula, selama ada pemilu yang “luber”, partai-partai inklusif dirangsang terus untuk menambah jumlah pengikutnya dengan cara memasukan golongan baru, sehingga menjadi lebih inklusif lagi.[[15]](#footnote-16) Untuk itu sebuah keharusan dan penegasan bahwa strategi suatu partai seharusnya menjadi panduan partai tersebut menjawab berbagai persoalan yang ada, dan setiap kebijakan partai dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Penyimpangan kebijakan dari garis yang telah menjadi sebuah kesepakatan tentu akan mengakibatkan sebuah problem besar bahkan dapat membuat ketidakpercayaan pengikutnya dan masyarakat luas. Konsistensi menjadi sangat berarti dalam menjalankan kebijakan dari strategi dan ideologi yang menjadi asas perjuangan dari Partai Keadilan Sejahetra.

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**
2. **Batas Masalah**

Guna memudahkan agar dapat menyelesaiakan rumusan masalah diatas selanjutnya penulis batasi ruang lingkupnya sesuai batasan sebagai berikut:

1. Menjelaskan Konsep Syariat Islam
2. Menjelaskan Konsep Strategi
3. Menjelaskan Konsep Partai Politik
4. **Rumusan Masalah**
5. Bagaimana Konsep Partai Keadilan Sejahtera Mengimplementasikan Syariat Islam di Kota Kendari
6. Faktor- faktor apa yang Mendukung dan Menghambat Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengimplementasiakan Syariat Islam di Kota Kendari
7. Bagaimana Langkah-langkah Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengiplementasikan Syariat Islam di Kota Kendari?
8. **Definisi Operasional**

Sebelum menguraikan secara operasional untuk itu penulis terlebih dahulu menguraikan secara sederhana tentang pengertian dari beberapa untaian kata dalam skripsi yang berjudul “ Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Mengimlementasikan Syariat Islam di Kota Kendari ” :

1. Startegi Partai Keadilan Sejahtera adalah siasat, metode, dan taktik yang digunakan dalam metode dakwah
2. Strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas-aktifitas untuk menanggapi lingkungan dan membantu mencapai sasaran atau tujuan organisasi. [[16]](#footnote-17)
3. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader yang berasaskan Islam, partai dakwah, di mana pergerakan kadernya lebih militan jika dibanding dengan partai lain.
4. Syariat adalah arahan-arahan atau jalan bagi pengaturan hidup individu maupun kelompok.
5. Sistem penerapan syariat merupakan tatanan yang menggambarkan tentang apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dari keyakinan (aqidah), ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis dapat menarik sebuah pengertian secara operasional apa yang di maksud dari Strategi Partai Keadilan Sejahtera adalah siasat, metode dan taktik dalam mengatur manusia menuju jalan yang telah ditentukan oleh syariat dalam meraih keselamatan dunia dan akhirat.

**D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui konsep apa yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengimplementasiakan Syariat Islam di Kota Kendari
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang medukung dan menghambat Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengimpementasikan Syariat Islam di Kota Kendari
3. Untuk mengetahui langkah Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengimplementasiakan Syariat Islam di Kota Kendari

2. Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini oleh penulis adalah:

1. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis mengenai Partai Keadilan Sejahtera
2. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap mahasiswa terhadap dunia kepartaian.
3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bahan referensi ilmiah perpustakaan dan bahan perbandingan untuk studi masalah selanjutnya bagi mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

1. Jony Edward, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006). h. 33 [↑](#footnote-ref-2)
2. Abul A’la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan,). h.13 [↑](#footnote-ref-3)
3. Taqiyuddin an- Nabhani,*Peraturan Hidup dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia,). h.7 [↑](#footnote-ref-4)
4. Maududi, hukum....... *h.29* [↑](#footnote-ref-5)
5. H.Harun Nasution,*Ensiklopesdi Islam Indonesia,*(Jakarta: Djambatan, 2002), h. 476 [↑](#footnote-ref-6)
6. Budiardjo, Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008. h. 35 [↑](#footnote-ref-7)
7. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2*, (Gema Insani Pers,1995), h.895 [↑](#footnote-ref-8)
8. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia “Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,* (Jakarta : Media Pers), *h.* 60 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Kacung Marijan, *Sistem*.......h.61 [↑](#footnote-ref-11)
11. Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati “Dari dilema ke Kompromi”,*(Jakarta: 2006), h. 34 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
13. Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi Dan Progaram 2004-2009, (Jakarta: Kompas, 2004), h. 230. [↑](#footnote-ref-14)
14. Husain Al-Banjari, *Prospek Partai Keadilan*, edisi., Mengapa Partai Islam Kalah? (Jakarta: Alvabet, 1999), h. 276. [↑](#footnote-ref-15)
15. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), h. 14. [↑](#footnote-ref-16)
16. <http://remajasampit.blogspot.com/2012/04/pengertian-dakwah.html> [↑](#footnote-ref-17)